



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 92 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 157);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6 Seri A);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 3 Seri A);
- 19. Peraturan Bupati Siak Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 terdiri dari:

- a. Pendapatan
 - 1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 543.491.115.206,92
 - 2. Pendapatan Transfer Rp. 1.843.639.450.730,00
 - Jumlah Pendapatan Rp. 2.387.130.565.936,92
- b. Belanja
 - 1. Belanja Operasi
 - a) Belanja Pegawai Rp. 948.988.519.505,00
 - b) Belanja Barang dan Jasa Rp. 896.748.844.909,34
 - c) Belanja Subsidi Rp. 22.713.346,00

d) Belanja Hibah	Rp. 79.102.560.718,00
e) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp. 1.747.200.000,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp. 1.926.609.838.478,34

2. Belanja Modal

a) Belanja Tanah	Rp. 0,00
b) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 46.069.078.063,00
c) Belanja Gedung dan Bangunan	Rp. 78.257.349.412,00
d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 320.044.032.828,00
e) Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp. 16.685.909.236,00
f) Belanja Aset Lainnya	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp. 461.056.369.539,00

3. Belanja Tidak Terduga

a) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 525.722.650,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp. 525.722.650,00

4. Transfer/ Bagi Hasil ke Desa

a) Bagi Hasil Pajak	<u>Rp. 11.753.000.000,00</u>
Jumlah Transfer/ Bagi Hasil ke Desa	Rp. 11.753.000.000,00

5. Transfer/ Bantuan Keuangan

a) Bantuan Keuangan ke Desa	Rp. 261.120.211.570,00
b) Bantuan Keuangan Lainnya	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Transfer/ Bantuan Keuangan	Rp. 261.120.211.570,00

Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.661.065.142.237,34</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (273.934.576.300,42)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan	Rp. 283.548.481.708,50
2. Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 283.548.481.708,50</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 9.613.905.408,08

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 8 September 2025**

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 8 September 2025**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

FAUZI ASNI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 92

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi 1.01.2.22.2.19.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Jumlah		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum	Keterangan	
												Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp	%			
1											2	3	4	5=(3-4)	6	7	8	
1	01	1.01.2.22.2.19.01.0000	00	0.00	0000	4					PENDAPATAN DAERAH	282,500,000.00	214,090,000.00	(68,410,000.00)	75.78			
1	01	1.01.2.22.2.19.01.0000	00	0.00	0000	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	282,500,000.00	214,090,000.00	(68,410,000.00)	75.78			
1	01	1.01.2.22.2.19.01.0000	00	0.00	0000	4	1	02			Retribusi Daerah	282,500,000.00	214,090,000.00	(68,410,000.00)	75.78			
1	01	1.01.2.22.2.19.01.0000	00	0.00	0000	4	1	02	02		Retribusi Jasa Usaha	282,500,000.00	214,090,000.00	(68,410,000.00)	75.78			
1	01	1.01.2.22.2.19.01.0000	00	0.00	0000	4	1	02	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	271,500,000.00	200,900,000.00	(70,600,000.00)	74.00			
1	01	1.01.2.22.2.19.01.0000	00	0.00	0000	4	1	02	02	01	0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	271,500,000.00	200,900,000.00	(70,600,000.00)	74.00		
1	01	1.01.2.22.2.19.01.0000	00	0.00	0000	4	1	02	02	17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	11,000,000.00	13,190,000.00	2,190,000.00	119.91			
1	01	1.01.2.22.2.19.01.0000	00	0.00	0000	4	1	02	02	17	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	11,000,000.00	13,190,000.00	2,190,000.00	119.91		
											Jumlah Pendapatan	282,500,000.00	214,090,000.00	68,410,000.00	75.78			
0	00	1.01.2.22.2.19.01.0000	00	0.00	0000	5					BELANJA	765,281,641,715.00	698,703,286,199.00	66,578,355,516.00	91.30			
1	01	1.01.2.22.2.19.01.0000	00	0.00	0000						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	765,281,641,715.00	698,703,286,199.00	66,578,355,516.00	91.30			
1	01	1.01.2.22.2.19.01.0000	01	0.00	0000						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	545,625,830,297.00	509,247,720,240.00	36,378,110,057.00	93.33			
1	01	1.01.2.22.2.19.01.0000	01	2.01	0000						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,045,209,848.00	1,826,643,702.00	1,218,566,146.00	59.98			
1	01	1.01.2.22.2.19.01.0000	01	2.01	0001						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,045,209,848.00	1,826,643,702.00	1,218,566,146.00	59.98			
1	01	1.01.2.22.2.19.01.0000	01	2.01	0001	5	1				BELANJA OPERASI	3,045,209,848.00	1,826,643,702.00	1,218,566,146.00	59.98			
1	01	1.01.2.22.2.19.01.0000	01	2.01	0001	5	1	01			Belanja Pegawai	22,200,000.00	20,100,000.00	2,100,000.00	90.54			
1	01	1.01.2.22.2.19.01.0000	01	2.01	0001	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	22,200,000.00	20,100,000.00	2,100,000.00	90.54			
1	01	1.01.2.22.2.19.01.0000	01	2.01	0001	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	22,200,000.00	20,100,000.00	2,100,000.00	90.54			
1	01	1.01.2.22.2.19.01.0000	01	2.01	0001	5	1	01	03	07	0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	22,200,000.00	20,100,000.00	2,100,000.00	90.54		
1	01	1.01.2.22.2.19.01.0000	01	2.01	0001	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	3,023,009,848.00	1,806,543,702.00	1,216,466,146.00	59.76			

1											2	3	4	5=(3-4)	6	7	8	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	0004						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	177,232,500.00	30,286,000.00	146,946,500.00	17.09			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	0004	5	1				BELANJA OPERASI	177,232,500.00	30,286,000.00	146,946,500.00	17.09			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	0004	5	1	01			Belanja Pegawai	9,875,000.00	3,200,000.00	6,675,000.00	32.41			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	0004	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9,875,000.00	3,200,000.00	6,675,000.00	32.41			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	0004	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	9,875,000.00	3,200,000.00	6,675,000.00	32.41			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	0004	5	1	01	03	07	0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9,875,000.00	3,200,000.00	6,675,000.00	32.41		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	0004	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	167,357,500.00	27,086,000.00	140,271,500.00	16.18			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	0004	5	1	02	01		Belanja Barang	24,307,500.00	5,536,000.00	18,771,500.00	22.77			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	0004	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	24,307,500.00	5,536,000.00	18,771,500.00	22.77			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	0004	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8,747,500.00	0.00	8,747,500.00	0.00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	0004	5	1	02	01	01	0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4,070,000.00	4,015,000.00	55,000.00	98.65		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	0004	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11,490,000.00	1,521,000.00	9,969,000.00	13.24		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	0004	5	1	02	02		Belanja Jasa	143,050,000.00	21,550,000.00	121,500,000.00	15.06			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	0004	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	143,050,000.00	21,550,000.00	121,500,000.00	15.06			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	0004	5	1	02	02	01	0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	143,050,000.00	21,550,000.00	121,500,000.00	15.06		
											Jumlah Belanja	49,465,698,672.00	45,194,096,861.00	4,271,601,811.00	91.36			
											Total Surplus/(Defisit)	(49,465,698,672.00)	(45,194,096,861.00)	(4,271,601,811.00)	91.36			

Siak Sri Indrapura, September 2025
BUPATI SIAK


AFNI. Z

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TA 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Bertambah/Berkurang	
				5 = RP	6 = (4 / 3) * 100
1	2	3	4		
4	PENDAPATAN DAERAH	2,993,033,486,431.10	2,387,130,565,936.92	(605,902,920,494.18)	79.76
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	643,457,944,173.00	543,491,115,206.92	(99,966,828,966.08)	84.46
4.1.01	Pajak Daerah	151,395,000,000.00	152,942,813,157.66	1,547,813,157.66	101.02
4.1.02	Retribusi Daerah	22,308,401,000.00	22,622,973,128.00	314,572,128.00	101.41
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	365,103,612,251.00	276,491,766,014.00	(88,611,846,237.00)	75.73
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	104,650,930,922.00	91,433,562,907.26	(13,217,368,014.74)	87.37
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	643,457,944,173.00	543,491,115,206.92	(99,966,828,966.08)	84.46
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2,349,575,542,258.10	1,843,639,450,730.00	(505,936,091,528.10)	78.47
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2,160,009,042,258.10	1,721,391,832,052.00	(438,617,210,206.10)	79.69
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	189,566,500,000.00	122,247,618,678.00	(67,318,881,322.00)	64.49
	JUMLAH PENDAPATAN	2,349,575,542,258.10	1,843,639,450,730.00	(505,936,091,528.10)	78.47
5	BELANJA DAERAH	3,229,776,296,319.65	2,661,065,142,237.34	568,711,154,082.31	82.39
5.1	BELANJA OPERASI	2,296,659,537,472.75	1,926,609,838,478.34	370,049,698,994.41	83.89
5.1.01	Belanja Pegawai	1,054,765,075,227.52	948,988,519,505.00	105,776,555,722.52	89.97
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,140,805,417,235.23	896,748,844,909.34	244,056,572,325.89	78.61
5.1.04	Belanja Subsidi	300,000,000.00	22,713,346.00	277,286,654.00	7.57
5.1.05	Belanja Hibah	96,738,105,010.00	79,102,560,718.00	17,635,544,292.00	81.77
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4,050,940,000.00	1,747,200,000.00	2,303,740,000.00	43.13
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2,296,659,537,472.75	1,926,609,838,478.34	370,049,698,994.41	83.89
5.2	BELANJA MODAL	648,605,950,551.90	461,056,369,539.00	187,549,581,012.90	71.08
5.2.01	Belanja Modal Tanah	14,126,834,000.00	0.00	14,126,834,000.00	0.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97,233,626,065.90	46,069,078,063.00	51,164,548,002.90	47.38
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123,851,528,602.00	78,257,349,412.00	45,594,179,190.00	63.19

1	2	3	4	5 = RP	6 = (4 / 3) * 100
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	391,780,894,857.00	320,044,032,828.00	71,736,862,029.00	81.69
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21,613,067,027.00	16,685,909,236.00	4,927,157,791.00	77.20
	JUMLAH BELANJA MODAL	648,605,950,551.90	461,056,369,539.00	187,549,581,012.90	71.08
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5,549,814,995.00	525,722,650.00	5,024,092,345.00	9.47
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5,549,814,995.00	525,722,650.00	5,024,092,345.00	9.47
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	5,549,814,995.00	525,722,650.00	5,024,092,345.00	9.47
5.4	BELANJA TRANSFER	278,960,993,300.00	272,873,211,570.00	6,087,781,730.00	97.82
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	17,518,860,000.00	11,753,000,000.00	5,765,860,000.00	67.09
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	261,442,133,300.00	261,120,211,570.00	321,921,730.00	99.88
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	278,960,993,300.00	272,873,211,570.00	6,087,781,730.00	97.82
	JUMLAH BELANJA	3,229,776,296,319.65	2,661,065,142,237.34	568,711,154,082.31	82.39
	SURPLUS/DEFISIT	(236,742,809,888.55)	(273,934,576,300.42)	(37,191,766,411.87)	115.71
6	PEMBIAYAAN DAERAH	283,548,481,708.03	283,548,481,708.50	(0.47)	100.00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	283,548,481,708.03	283,548,481,708.50	(0.47)	100.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	283,548,481,708.03	283,548,481,708.50	(0.47)	100.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	283,548,481,708.03	283,548,481,708.50	(0.47)	100.00
	PEMBIAYAAN NETTO	283,548,481,708.03	283,548,481,708.50	(0.47)	100.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	46,805,671,819.48	9,613,905,408.08	(37,191,766,412.34)	20.54

Siak Sri Indrapura, September 2025

BUPATI SIAK


AFNI. Z